BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional. Begitu hal nya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Dengan ketahanan ekonomi yang kuat, negara mampu memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya secara merata untuk kesejahteraan masyarakatnya. Melalui Kementrian Koperasi dan UKM, pembangunan nasional secara khusus memfokuskan pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Saat ini UMKM telah berkontribusi sangat besar untuk penyerapan tenaga kerja maupun pendapatan nasional. Merujuk pada data Badan Pusat Satistik Nasional menyebutkan tingkat presentase jumlah UMKM hingga tahun 2012 berjumlah 56,5 juta unit dan 98,9% adalah usaha mikro.

Tabel 1.1
Perkembangan UMKM Periode 2009-2012

No.	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah UMKM	Unit	52 764 603	53 823 732	55 206 444	56 534 592
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2.64	2.01	2.57	2.41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	96 211 332	99 401 775	101 722 458	107 657 509
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	2.33	3.32	2.33	5.83
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1 212 599.30	1 282 571.80	1 369 326.00	1 504 928.20
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	4.02	5.77	6.76	9.90
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	162 254.52	175 894.89	187 441.82	208 067.00
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	-8.85	8.41	6.56	11.00

(Sumber: Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322, 2012)

Pertumbuhan UMKM pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, terlihat pada data rujukan yang dimiliki Badan Pusat Statistik Nasional sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Selain itu penyerapan tenaga kerja yang diserap oleh UMKM mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk pengurangan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Selain mengacu pada data diatas, peneliti membandingkan dengan data yang dimiliki oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Unit usaha UMKM dan laju penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sangat berbeda dengan Usaha Besar (UB) yang ada di Inonesia. Hal tersebut terbukti bahwa UMKM mempunyai peran penting untuk peningkatan perekonomian di Indonesia dibandingkan para pelaku Usaha Besar. Terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Perkembangan UMKM Periode 2011-2012

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2011 *)		TAHUN 2012 **)		PERKEMBANGAN TAHUN 2011-2012	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	55.211.396		56.539.560		1.328.163	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	*(Unit)*	*55.206.444*	*99,99*	*56.534.592*	*99,99*	*1.328.147*	*2,41*
	- Usaha Mikro (UMi)	*(Unit)*	*54.559.969*	*98,82*	*55.856.176*	*98,79*	1.296.207	*2,38*
	- Usaha Kecil (UK)	*(Unit)*	*602.195*	*1,09*	*629.418*	*1,11*	27.223	*4,52*
	- Usaha Menengah(UM)	*(Unit)*	*44.280*	*0,08*	*48.997*	*0,09*	4.717	*10,65*
	B. Usaha Besar (UB)	*(Unit)*	4.952	*0,01*	*4.968*	*0,01*	16	0,32
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	104.613.681		110.808.154		6.194.473	5,92
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	*(Orang)*	*101.722.458*	*97,24*	*107.657.509*	*97,16*	*5.935.051*	*5,83*
	- Usaha Mikro (UMi)	*(Orang)*	*94.957.797*	*90,77*	*99.859.517*	*90,12*	*4.901.720*	*5,16*
	- Usaha Kecil (UK)	*(Orang)*	*3.919.992*	*3,75*	*4.535.970*	*4,09*	*615.977*	*15,71*
	- Usaha Menengah(UM)	*(Orang)*	*2.844.669*	*2,72*	*3.262.023*	*2,94*	*417.354*	*14,67*
	B. Usaha Besar (UB)	*(Orang)*	*2.891.224*	*2,76*	*3.150.645*	*2,84*	*259.422*	*8,97*

(Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=109:data-umkm-2012&Itemid=93, 2012)

Seiring dengan pertumbuhan UMKM yang begitu tinggi maka akan berdampak dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan produktifitas dan pemberdayaan potensi UMKM seharusnya

merupakan gerakan bersama antar berbagai pihak, namun pemerintah memegang peranan terbesar dalam upaya tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan dan memberdayakan UMKM telah diatur jelas dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas prinsip, tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi pemberdayaan, sangsi administratif, dan ketentuan pidana.

UMKM mendapat perhatian serius pemerintah dengan diamanatkannya Undang-Undang tentang UMKM. Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 7 ayat 1 (satu) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dipersilahkan untuk membuat sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan sesuai aspek yang dijelaskan pada pasal 7 tersebut sesuai iklim usaha di daerah. Selain amanat dari undang-undang No 20 Tahun 2008, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal pembagian urusan pemerintahan menyebutkan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib kewenangan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota (Pasal 11 dan 12). Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota didasarkan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalistis, serta kepentingan strategis nasional (Pasal 9 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 1).

Dalam konteks pembangunan nasional sebagai daerah otonomi dengan seluruh keragaman yang dimiliknya, Kota Bandung merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional sebagai kawasan dengan sektor unggulan UMKM, Industri, Jasa dan Pariwisata. Potensi industri kecil dan menengah yang berada di Kota Bandung memiliki jumlah yang cukup signifikan dibandingkan potensi industri besar. Dengan sebuah potensi masyarakat yang cukup kreatif, Kota Bandung menjadi sebuah panutan bagi kota lainnya dalam mengembangkan dan memajukan potensi UMKM yang dimiliki pada setiap kota di Indonesia. Potensi industri kecil dan menengah di Kota Bandung terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Potensi Industri Kecil dan Menengah
Kota Bandung Tahun 2013

KRITERIA CRITERIA	**UNIT USAHA** *ESTABLISH UNIT*	**TENAGA KERJA** *MANPOWER*
[1]	[2]	[1]
1. *) INDUSTRI BESAR	152	10.605
2. **) INDUSTRI MENENGAH	216	7.406
3. ***) INDUSTRI KECIL FORMAL	3.170	51.420
4. ****) INDUSTRI KECIL NON FORMAL	6.328	20.572
J U M L A H	**9.866**	**90.003**

Catatan : *) ..... Nilai Investasi di atas Rp 1.000.000.000,-
**) ..... Nilai Investasi Rp 200.000.000,- s/d Rp 1000.000.000,-
***) .... Nilai Investasi Rp 5.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-
****) ... Nilai Investasi di bawah Rp 5.000.000,-

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Bandung dalam angka 2014)

Pada tabel diatas, dapat peneliti jelaskan bahwa jumlah unit industri kecil dan menengah lebih mendominasi dibandingkan jumlah unit industri dengan skla besar. Penyerapan tenaga kerja pun jauh lebih besar diserap oleh para pelaku industri kecil yang ada di Kota Bandung.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan UMKM di Kota Bandung, pemerintah pusat melalui Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia memberikan sebuah penghargaan kepada pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut berdasarkan data yang dipublikasikan pada *website* www.inilahkoran.com yang mengatakan bahwa:

> "Kota Bandung menjadi salah satu kota penggerak koperasi dan UKM tahun 2014 dengan peringkat Paramadhana Madya Nugraha Koperasi dengan nilai 82.10. Penetapan tersebut ditandai dengan diserahkannya penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Pusapayoga yang diterima Wakil Walikota Bandung Oded M Danial di gedung SMESCO Tower Jakarta Selatan (9/12/2014). Nilai tersebut hasil dari verifikasi lapangan, Kota Bandung dinilai mempunyai sebuah komitmen yang tinggi terhadap keberlangsungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM".
> (Sumber: http://dunia.inilah.com/read/detail/2161182/bandung-didaulat-jadi-kota-penggerak-koperasi, 2014).

Berdasarkan berita diatas, dengan ditetapkannya Kota Bandung sebagai kota penggerak koperasi dan UMKM di Indonesia, menjadikan Kota Bandung sebagai panutan bagi Kota lainnya dalam memberdayakan, mengembangkan, dan memajukan potensi UMKM yang dimiliknya. Pemberdayaan UMKM yang berada di Kota Bandung diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan daerah ini memuat tentang ketentuan umum, asas, tujuan, arah kebijakan, tugas wewenang pemerintah daerah, kriteria, perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, kemitraan, hak dan kewajiban masyarakat, peran dunia usaha, insentif, larangan, sanksi asministrasi, dan ketentuan pidana,

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018, Pemerintah Kota Bandung merancang peningkatan ekonomi melalui sentra-sentra UMKM potensial yang berada di wilayah Kota Bandung.

Terdapat 7 (tujuh) sentra UMKM yang memiliki potensi unggulan dan ciri khas dari Kota Bandung yang kini menjadi fokus pengembangan Pemerintah Kota Bandung, yaitu sentra industri rajutan Binong Jati, sentra perdagangan kain Cigondewah, sentra perdagangan *jeans* Cihampeulas, sentra industri kaos Suci, sentra industri dan perdagangan sepatu Cibaduyut, sentra industri tahu Cibuntu, dan sentra industri boneka Sukamulya Sukajadi. Diantara ke 7 sentra tersebut, satu diantaranya Sentra Kaos Suci yang menjadi lokus peneliti dalam penulisan penelitian ini.

Bisnis UMKM kaos menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi diberbagai daerah di Indonesia seperti *Air Brush* Surabaya, Dagadu Djogja, Joger Bali, dan C59 Kota Bandung yang menjadi *leader* utamanya. Kota Bandung dapat dikatakan menjadi *leader* atau gudang para pelaku UMKM dan Industri kreatif di Indonesia. Memang bisa diakui bahwa pelaku bisnis UMKM Kota Bandung dapat menginspirasi berbagai orang dengan kreatifitas yang dihasilkannya. Beberapa hal yang menarik di Kota Bandung adalah trend *fashionnya,* khususnya *fashion tshirt* atau kaos. Berbagai macam kaos yang bervariatif dan terus mengikuti perkembangan jaman bisa selalu muncul dari kreatifitas para pelaku UMKM Sentra Kaos di Kota Bandung. Dengan tumbuhnya iklim usaha yang baik maka akan mendorong pada perbaikan ekonomi dimana akan berdampak luas pada masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan. Para pelaku UMKM kaos harus mampu menghadapi semua tantangan baik persaingan pasar lokal dan pasar bebas yang terus mengancam para pelaku UMKM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rovindo Maisya dengan judul Pemberdayaan Industri Kreatif Kerajinan Rajutan Binong Jati oleh Pemerintah Kota Bandung dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran pada tahun 2013. Penelitiannya menggunakan teori pemberdayaan Suharto dengan metode penelitian kualitatif dan penentuan informan *Purposive Sampling*. Beliau mengemukakan dalam penelitiannya berbagai permasalahan yaitu kurangnya ruang lingkup akses pemasaran pada industri rajutan karena tidak adanya lokasi *showroom* untuk memasarkan produknya, kurangnya minat pembeli dikarenakan seperti masih terisolisir dengan infrastruktur yang belum memadai untuk dapat masuk ke dalam lingkungan tersebut, dan tingginya biaya bahan baku untuk produksi yang membuat keuntungan pengrajin rajutan memperoleh marjin keuntungan yang rendah. Hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Bandung yang mempunyai tujuan untuk merevitalisasi sentra industri yang di Kota Bandung.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sandy Prayoga dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Serang dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran pada tahun 2013. Penelitiannya menggunakan teori pemberdayaan Harry Hikmat dengan metode penelitian kualitatif dan penentuan informan *Purposive Sampling*. Permasalahan UMKM olahan makanan yang menjadi potensi ciri khas Kota Serang yang ia paparkan pada penelitiannya adalah Inovasi produk yang masih belum memiliki daya saing, dikarenakan produksi hasil olahan makanan seperti sate bandeng, emping pedas masih diproduksi dan dikemas secara manual dan tradisional. Kurangnya

pengetahuan dan kemampuan maupun tetap memegang cara tradisi nenek moyang nya terdahulu dengan cara tardisional menjadi faktor penghambat untuk berdaya saing agar mampu memberikan sebuah kemasan maupun cita rasa yang lebih inovatif. Hal tersebut menjadi bahan perhatian dan pertimbangan pemerintah Kota Serang untuk membuat sebuah program yang bisa mendorong para pelaku berinovasi dengan tetap memegang tradisinya. Sehingga olahan makanan ciri khas Kota Serang tersebut dapat berkembang baik di pasar lokal maupun internasional.

Permasalahan yang dihadapai pelaku UMKM Di Jawa Barat Khusunya Kota Bandung sendiri dihadapkan pada sebuah permasalahan yang kini bukan lagi sebuah masalah permodalan, melainkan sebuah permasalahan daya saing sebuah produk. Seperti yang dikemukakan oleh Anton Gustoni Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, Senin (1/12/2014). yang dipublikasikan oleh *website* www.galamedianews.com menyebutkan bahwa:

> "Terjadi pergeseran permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM jika sebelumnya permasalahan biaya, kini masalah daya saing produk yang menjadi kendala utama pelaku UMKM dalam memasarkan produknya". (Sumber:http://m.galamedianews.com/bandungraya/1383/daya-saing-produk-jadi-masalah-umkm.html, 2014)

Berita diatas dapat menggambarkan sebagai permasalahan yang muncul dimana para pelaku UMKM belum dapat meningkatkan daya saing dalam memproduksi produknya sehingga bernilai jual tinggi. Daya saing pelaku UMKM terkendala dengan kurangnya penguatan pengetahuan dan akses pasar yang luas untuk dapat bersaing baik di pasar dalam negeri maupun di pasar global. Hal ini mengakibatkan pelaku UMKM tidak dapat berkembang dan meningkatkan produktifitasnya secara maksimal.

Permasalahan UMKM yang telah dijelaskan diatas pada dasaranya bisa diatasi secara perlahan apabila peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemberdayaannya dapat lebih optimal untuk meningkatkan produktifitas pelaku UMKM di Indonesia khususnya Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, permasalahan yang hampir serupa ditemukan seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat diatas, khusunya UMKM Sentra Kaos Suci yang menjadi lokasi peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti mengidentifikasi bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung dalam memberdayakan potensi UMKM Sentra Kaos Suci agar dapat meningkatkan keberdayaanya sehingga mampu menghadapi permasalahan-permasalahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, didapatkan sebuah data bahwa masalah pokok yang kini dihadapi para pelaku UMKM Sentra Kaos Suci yaitu belum memiliki fasilitas tempat usaha milik sendiri dan tempat pengembangan yang lebih baik, belum memiliki pengetahuan dan kemampuan inovasi teknologi produksi yang dapat meningkatkan produktifitas kinerja, dan belum mendapatkan perlindungan legalitas kegiatan usaha maupun tempat usaha. Hal ini membuat para pelaku UMKM Sentra Kaos Suci tidak dapat berkembang dan meningkatkan daya saing sebuah produk kaos yang dihasilkan. Sehingga para pelaku usaha kesulitan untuk bersaing memenuhi kebutuhan pasar, terlebih apabila ada pesanan dengan jumlah banyak dan membutuhkan waktu singkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka bagaimana Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung melakukan fungsi pemberdayaan terhadap UMKM Sentra Kaos Suci di Kota Bandung. Sejauh mana sebuah program pemberdayaan dilakukan dan tepat sasaran terhadap pelaku UMKM Sentra Kaos Suci. Terlebih dalam memenuhi pasar lokal maupun menghadapi pasar bebas yang menjadi persaingan lebih ketat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh, dalam penyusunan penelitian skripsi yang berjudul:

"Pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana Pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan para pelaku UMKM Sentra Kaos Suci oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci melalui pendekatan pemungkinan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci melalui pendekatan penguatan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci melalui pendekatan perlindungan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci melalui pendekatan penyokongan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci melalui pendekatan pemeliharaan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ditinjau dari sudut pendekatan keilmuan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci di Kota Bandung menghadapi persaingan pasar lokal maupun pasar global dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih riset bagi kajian pemerintahan pada program studi Ilmu Pemerintahan, selain itu mendorong pengembangan konsep dan teori tentang pemberdayaan. sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu

Pemerintahan sebagai sebuah disiplin kajian ilmu yang mandiri dan ilmiah, baik saat ini maupun yang akan datang

3. Kegunaan Praktis, penelitan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bandung sebagai bahan masukan untuk membuat sebuah terobosan baru dan tetap menjaga konsistensinya dalam Pemberdayaan pelaku UMKM Sentra Kaos Suci. Bagi pelaku UMKM Sentra Kaos Suci dapat memahami dan mengetahui apa saja kebijakan program yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan daya saing maupun produktifitas para pelaku UMKM Sentra Kaos Suci.